

PERAN KOMITE MADRASAH DI MIN 1 BANDAR LAMPUNG

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas -Tugas dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Oleh:

LENI YULIANI

NPM: 1811030326

Jurusan: Manajemen Pendidikan Islam

Pembimbing I : Dr. Ahmad Fauzan,M.Pd

Pembimbing II : Aditia Fradito, M.Pd.I



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan di MIN 1 Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan: Pihak Komite Madrasah MIN 1 Bandar Lampung. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan kredibilitas data dengan triangulasi. Tahapan dalam penelitian ini adalah tahap pralapangan, tahap penelitian, dan tahap pelaporan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing peran komite sekolah yaitu peran pendukung dan peran mediator berjalan secara maksimal. Komite sekolah sebagai independent sangat memerlukan dukungan dan Kerjasama dengan berbagai pihak serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi pengurus komite sekolah.

Peran Komite Madrasah di MIN 1 Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari segi input, proses dan outputnya. Peran Komite Madrasah di MIN 1 Bandar Lampung meliputi 1). Sebagai badan Pendukung (*Supporting Agency*), pihak komite memberikan dukungan berupa sumbangsiah ide dan tenaga serta menerima aspirasi orang tua wali murid dan menginisiasi rapat yang melibatkan pihak sekolah dan orang tua wali murid. Dan 2). Sebagai badan Penghubung atau Mediator (*Mediator Agency*), pihak komite madrasah menjembatani antar pihak sekolah dengan orang tua wali murid dalam merumuskan kebijakan baik program maupun sarana dan prasarana. Implikasi atau saran dari penelitian ini adalah: 1) Komite sekolah diharapkan dapat bekerja sama dengan lebih baik dengan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, untuk sama-sama memajukan sekolah dan membuat rencana anggaran sekolah serta program sekolah secara bersama-sama melibatkan semua pihak. 2). Komite sekolah diharapkan lebih memahami tugas dan perannya sesuai dengan keputusan pemerintah dan kebutuhan sekolah. 3). Komite sekolah diharapkan lebih sering melakukan pemantauan sekolah secara rutin dan mengadakan pertemuan rutin dengan pihak sekolah maupun orang tua siswa.

Kata Kunci: Komite, Madrasah, Peran

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the role of the school committee in improving the quality of education services at MIN 1 Bandar Lampung. The research was carried out using a qualitative approach with a case study design. The data was collected using interview, observation and documentation techniques with the informants: the Madrasah Committee of MIN 1 Bandar Lampung. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. To check the validity of the data, it is done by checking the credibility of the data by triangulation. The stages in this research are the pre-field stage, the research stage, and the research result reporting stage. The results showed that each of the school committee's roles, namely the supporting role and the mediator role, ran optimally. The school committee as an independent really needs support and cooperation with various parties as well as increasing the professionalism and competence of the school committee management. The role of the Madrasah Committee at MIN 1 Bandar Lampung has been running well. It can be seen in terms of input, process and output. The role of the Madrasah Committee at MIN 1 Bandar Lampung includes 1). As a Supporting Agency, the committee provides support in the form of contributing ideas and energy and accepts the aspirations of parents and guardians of students and initiates meetings involving the school and parents. and 2). As a liaison or mediator agency, the madrasa committee acts as a bridge between schools and parents and guardians of students in formulating policies, both program and school committees are expected to work together better with school principals, teachers, parents, to jointly advance the school and make school budget plans and school programs jointly involving all parties . 2). School committees are expected to better understand their duties and roles in accordance with government decisions and school needs. 3). The school committee is expected to carry out regular school monitoring and hold regular meetings with the school and parents.

Keywords: Committee, Madrasah, Role



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Yuliani
NPM : 1811030326
Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah Dan Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Komite Madrasah Di MIN 1 Bandar Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022
Penulis,



Leni Yuliani
1811030326



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Peran Komite Madrasah Di MIN 1 Bandar
Lampung"
Nama : Leni Yuliani
NPM : 1811030326
Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah Dan Keguruan

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd
NIP.197208182006041006

Pembimbing II,

Aditia Fradito, M.Pd.I
NIP.198803292019031006

Mengetahui
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Yetri, M. Pd
NIP. 196512151994032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Komite Madrasah Di MIN 1 Bandar Lampung” disusun oleh Leni Yuliani, NPM: 1811030326 program studi Manajemen Pendidikan Islam. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung pada hari Kamis, Tanggal 29 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd. (.....)

Sekretaris : Ilhami, M.Pd. (.....)

Penguji Utama : Dr. Hj. Yetri, M.Pd. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd. (.....)

Penguji Pendamping II : Aditifa Fradito, M.Pd.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Nurva Diana, M.Pd

NIP. 196408281988032002



MOTTO

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي
سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۚ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ
شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon - pohon kayu, dan di tempat - tempat yang dibikin manusia",. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Qs. An-Nahl: 68-69)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

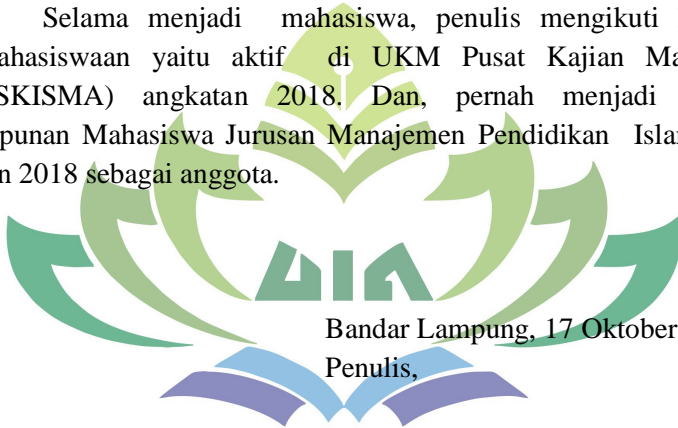
1. Kedua Orang tuaku, Bapak Yanto Taryono dan Ibu Lilis Rodiah yang telah membesarkanku, membimbing dan senantiasa berdoa tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh dimata, namun lantunan do'anya mampu kurasakan. Kulihat getar-getar bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini.
2. Saudara kandungku, Raisha Putri Mirzani, yang senantiasa juga merberikan do`a dan semangatnya kepadaku aku ucapkan terimakasih.
3. Kepada keluarga besar ayah dan ibuku yang senantiasa mendukung dan medo`akanku sampai berada di titik ini aku ucapkan teriamakasih.
4. Teman-teman seperjuangan dan satu prodi Manajemen Pendidikan Islam, serta teman-teman satu almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan do`a dan semangatnya, aku ucapkan terimakasih.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung baik dosen prodi Manajemen Pendidikan Islam maupun bukan aku ucapkan terimakasih.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang kubanggakan.
7. Seseorang yang senantiasa juga membantu baik materi, maupun non materi sehingga aku dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik, aku ucapkan terimakasih.

RIWAYAT HIDUP

Leni Yuliani, lahir di Sukapura, pada tanggal 17 Mei 1999 Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yanto Taryono dan Ibu Lilis Rodiah.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN 1 Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat tamat pada Tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Sumber Jaya tamat pada tahun 2015, pendidikan selanjutnya di jalani di SMA N 1 Sumber Jaya Kecamatan Sumber Jaya tamat pada tahun 2018. Dan ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di UKM Pusat Kajian Mahasiswa (PUSKISMA) angkatan 2018. Dan, pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2018 sebagai anggota.



Bandar Lampung, 17 Oktober 2022

Penulis,

Leni Yuliani

1811030326

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, mahasuci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan karena rahmat dan karuniaNya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. H Wan Jamaluddin PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana.M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Yetri, M.Pd. dan Dr. Riyuzen Praja Tuala,M.Pd selaku ketua dan sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
4. Dr. Ahmad Fauzan,M.Pd. dan Aditia Fradito, M.Pd.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
6. Desi Deria Herawati, S.Ag.M.Pd. selaku Kepala Sekolah MIN 1 Bandar Lampung dan Bapak, Ibu guru serta karyawan MIN 1 Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama peneliti melakukan penelitian.

7. Rekan-rekan angkatan 2018 jurusan MPI, yang turut membantu baik moril maupun materil dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini di sebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga amal bapak/ibu serta teman-teman dapat balasan dari Allah SWT Amin.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022

Penulis,



Leni Yuliani

1811030326

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Komite Sekolah	25
1. Pengertian Komite Sekolah	30
2. Tujuan Komite Sekolah	32
3. Tugas Komite Sekolah	63
4. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah.....	42
5. Prinsip Pembentukan Komite Sekolah	43
6. Mekanisme	43
7. Penetapan	44
B. Hubungan Komite Dengan Sekolah.....	45
C. Peran Komite Sebagai Pendukung (<i>Supporting Agency</i>)	47

D.Peran Komite Sebagai Mediator	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Identitas	53
2. Sejarah Madrasah	53
3. Tugas, Fungsi Dan Struktur Jabatan Madrasah	55
4. Visi, Misi dan Tujuan	62
5. Struktur Organisasi	64
B. Penyajian Fakta dan Data Lapangan	77
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	83
A. Analisis Data Penelitian.....	83
1. Komite Madrasah Sebagai Pendukung	83
2. Komite Madrasah Sebagai Mediator	88
B. Temuan Penelitian	90
1. Peran Komite Sebagai Pendukung di MIN 1 Bandar Lampung	90
2. Peran Komite Sebagai Mediator di MIN 1 Bandar Lampung	91
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	93
DAFTAR RUJUKAN.....	95
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian
2. Pedoman wawancara
3. Foto Dokumentasi
4. Surat Permohonan izin Penelitian



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis Kelamin Guru	65
Table 3.2 Latar Belakang Pendidikan Guru.....	65
Table 3.3 Kepegawaian (PNS/ Non PNS)	66
Tabel 3.4 Kepangkatan	66
Table 3.5 Keadaan Administrasi/ TU	66
Table 3.6 Daftar Nama Pegawai.....	67
Table 3.7 Data Keadaan Guru Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan dan Status Sertifikasi	74
Table 3.8 Data Jumlah Siswa Dari Tahun 2017 S.D Tahun 2022	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Penegasan tersebut diharapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Ditambah judul dalam skripsi ini mencerminkan keseluruhan dari yang akan di urai.

Adapun skripsi yang berjudul **“Peran Komite Madrasah di MIN 1 Bandar Lampung”**. Dengan uraian sebagai berikut.

1. Peran, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Komite Madrasah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur Pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah.¹ Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.²

¹ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan* (bandung: alfabeta, 2012).

² Kepmendiknas nomor: 044/U/2002.

3. MIN 1 Bandar Lampung dalam hal ini menjelaskan sejarah singkat berdirinya MIN 1 Bandar Lampung. MIN 1 Bandar Lampung ini merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang sudah cukup lama di Kota Bandar Lampung yang berdiri sejak tahun 1959 sampai saat ini dan selalu mengalami perubahan dan kemajuan setiap tahunnya, MIN 1 Bandar Lampung ini terletak di Jln. Teuku Umar/ Gajah NO. 2, Desa Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mutu pendidikan masih belum membaik sejak beberapa tahun belakangan ini. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan pada permasalahan pendidikan yang belum efisien, demokratis, berkeadilan, serta partisipatif. Hal ini terjadi sebagai akibat otonomi pengelolaan pendidikan dan profesional pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang belum sepenuhnya terwujud.

Sejak Undang-undang tentang pemerintahan daerah diberlakukan, terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan dari yang bersikap sentralistik kepada desentralistik.³ Ini tentu memberi harapan baru bagi daerah dan satuan pendidikan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dan bermutu pada masyarakat. Harapan ini yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mengembalikan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat yang hilang akibat pengelolaan pendidikan yang birokratis tersebut, ini penting karena sejak berlakunya Inpres No. 10 Tahun 1973. Secara praktis dan tanggung jawab pendidikan, terutama penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi beban pemerintah pusat, sehingga peran serta dan partisipasi masyarakat hanya sebatas pembiayaan pendidikan. Padahal banyak yang dapat dilakukan masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah.

Usaha atau kegiatan yang berpengaruh dengan pelaksanaan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu

³ UU No. 22 Tahun 1999.

pendidikan sebuah fenomena untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik berupa pengelolaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, mengkoordinasi usaha, maupun kepemimpinan secara umum.

Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah dan Komite Sekolah. Kepala sekolah dan guru bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, atau keluarga peserta didik. Eksistensi pemerintah dan masyarakat sama pentingnya, meskipun pengalaman menunjukkan bahwa bertolak dari keterbatasan sumber daya pendidikan selama ini masyarakat memang sudah dilibatkan. Tetapi keterlibatan mereka terbatas pada memenuhi iuran, kurang dilibatkan bagaimana pencapaian kurikulum dan pelayanan belajar yang bermutu. Di bawah sistem desentralisasi yaitu implementasi kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat, manajemen sekolah di arahkan untuk memberdayakan sekolah.

Tujuan pokok desentralisasi pendidikan khususnya pada tingkat sekolah mengerahkan dan memberdayakan masyarakat untuk bekerja sama yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dapat ditegaskan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun

luar sekolah. Nama dan ruang lingkup kewenangan wadah ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti Komite Sekolah, Dewan Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah. Atau nama lain sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sekolah dengan fokus pemenuhan mutu yang kompetitif.

Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan sekolah bagi anak-anaknya. Pembentukan Komite Sekolah yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community-based management*).

Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah dituangkan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

- 1.) Komite Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memperoleh input sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun finansial dari masyarakat, yang selanjutnya diproses di sekolah dan akhirnya menghasilkan output yang akan dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan organisasi yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat berkembang dan mencapai kemajuan tanpa keterlibatan masyarakat.
- 2.) Keberadaan komite sekolah merupakan bagian dari pewujudan manajemen berbasis sekolah yang melibatkan berbagai komponen, termasuk masyarakat dan wali murid.

Peran komite sekolah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan adalah sebagai badan “*advisory agency* (pemberi pertimbangan), *suporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

3.) Partisipasi masyarakat yang terintegrasi dalam komite sekolah dewasa ini menjadi hal yang penting dan dibutuhkan seiring meningkatnya minat peserta didik untuk meneruskan ke jenjang pendidikan menengah sesuai program wajib belajar sembilan tahun yang ditetapkan pemerintah.⁴ Tujuan pembentukan komite sekolah adalah untuk menciptakan akuntabilitas, transparansi dan peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah. “Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu kepada masukan, proses, luaran dan dampaknya.

Pentingnya sebuah komite di sebuah sekolah juga dijelaskan dalam Al-Qur’an, Seperti salah satu surah di dalam Al-Qur’an adalah An-Nahl yang artinya lebah. Firman Allah surah An-Nahl ayat 68-69.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ

ذُلًّا ۚ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon - pohon kayu, dan di tempat - tempat yang dibikin manusia",. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-

⁴ UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 56.

macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya. (Qs. An-Nahl: 68-69)⁵

Jelas bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa lebah bisa dijadikan media atau alat bagi orang – orang yang berfikir untuk mengenal dan mengetahui kebesaran Allah yang mana akan meningkatkan keimanan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW dalam mendidikan para sahabatnya juga selalu menggunakan alat atau media, baik berupa benda maupun non benda. Salah satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para sahabat adalah melalui media gambar.

Adanya Komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah di berbagai daerah sangat bervariasi, baik dari segi status, kinerja, peran, kualitas sekolah, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh komite sekolah. Berkaitan dengan sebuah lembaga pendidikan tersebut perlu adanya dukungan dari Pemerintah terhadap keberadaan komite sekolah. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian yang berkaitan dengan komite sekolah untuk mendapat gambaran yang utuh tentang peran komite sekolah yang terjadi selama ini.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.⁶ Dan untuk penamaan sebuah badan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau

⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran dan Tafsirnya. Jakarta: Menara Kudus, 1985. An Nahl 68-69.

⁶ Kepmendiknas nomor : 044/U/2002.

nama-nama lain yang telah disepakati bersama.⁷ Pada dasarnya posisi sebuah komite sekolah berada diantara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah. Dengan adanya peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu diperbaiki selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi dengan kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun budaya baru serta profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas pada pentingnya peningkatan mutu pendidikan. Untuk menciptakan masyarakat yang kompak dan sinergis, maka Komite Sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan.⁸

Menurut Komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam perencanaan yang memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan, serta memberi masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS. Pengelolaan sumber daya pendidikan seperti SDM, sarana prasarana, dan alokasi anggaran memerlukan peran Komite Sekolah sebagai penasehat dalam mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat serta adanya peran komite sebagai pendukung pengadaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.⁹ Adapun peran komite sekolah yaitu mewadahi serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat untuk melahirkan sebuah kebijakan operasional serta meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan pendidikan yang berguna untuk menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan

⁷ Nili Hayani, *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, April 2014, hlm. 164.

⁸ SK Mendiknas Nomor 044/U/2002.

⁹ M. Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. (Insania Vol. 14 No. 1 januari- download.portalgaruda.org/article.php.

pendidikan. dijalankan juga menjalankan fungsinya sebagai berikut:¹⁰

- 1) menumbuhkan sikap perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermutu
- 3) Menampung dan menganalisis ulang tentang aspirasi, ide-ide, tuntutan sebagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- 4) Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada sekolah mengenai: a) Kebijakan dan Program Pendidikan, b) Rencana Anggaran (RAPBS), c) Kriteria Kinerja satuan Pendidikan, d) Kriteria Tenaga Pendidik
- 5) Memotivasi serta mendukung orang tua murid dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
- 7) melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap kebijakan program pendidikan, penyelenggaraan serta pengeluaran di satuan pendidikan.

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang telah dibentuk dapat dikembangkan secara demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun

¹⁰ Ibid.

harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna, berbagai kewenangan dan kemitraan yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.¹¹ Dibandingkan dengan pengelolaan keuangan pendidikan yang sudah cukup sulit penanganannya, maka pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan terasa lebih sulit lagi, karena semua orang yang terlibat dalam manajemen dapat membuat pengelolaan menjadi tidak efektif, tidak efisien, atau mungkin gagal. Unsur perusak dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan relative lebih banyak dibandingkan dengan pengelolaan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan, orang - orang yang mempunyai kesempatan mengganggu pengelolaan keuangan diperkirakan hanya 3 (tiga) orang saja, yaitu kepala/pimpinan, bendaharawan, dan juru bayar atau kasir. Guru-guru, pegawai lain termasuk pesuruh dan para siswa tidak mempunyai kesempatan untuk itu, sehingga pengamanannya akan lebih mudah. Lain halnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Dalam skala kecil, misalnya sekolah, semua orang yang ada di sekolah yaitu kepala sekolah, guru, pegawai termasuk pesuruh dan para siswa dapat atau punya kesempatan mengacaukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu. Kelalaian seorang pesuruh dapat menimbulkan kebakaran gedung sekolah, sementara itu siswa mungkin saja dapat merusak alat – alat pendidikan seperti kursi, meja, buku dan lain sebagainya, atau bahkan kepala sekolah dapat membuat barang milik Negara menjadi milik pribadi dengan cara melarang petugas memasukkan barang tersebut ke dalam buku inventaris. Ini semua akan mengganggu pengelolaan sarana prasarana pendidikan di sekolah itu.

Seiring dengan adanya perubahan pada pola pemerintahan, yaitu dengan diperlakukannya otonomi daerah

¹¹ Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Konsep dan Aplikasinya*, , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 1.

yang berdampak pada otonomi pendidikan, maka pola manajemen sekolah juga berubah. Sekolah dituntut harus memiliki kemandirian dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi serta partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan mengoptimalkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan diperlukan adanya penyesuaian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut; (1) setiap satuan pendidikan wajib memilikisarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidika, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidik wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Agar sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembelajaran di sekolah, diperlukan warga sekolah (kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi) yang memahami, ahli dan mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara professional.¹² Hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah digariskan oleh kemendikbud tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh warga sekolah.

¹² Nomor 19 Tahun 2005 juncto Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah. Pada Bab VII Pasal 42 PP 32/2013).

Salah satu kompetensi tersebut adalah pendaayagunaannya secara optimal.¹³

Dalam komite sekolah di MIN 1 Bandar Lampung peneliti mewawancarai komite sekolah untuk pengumpulan data tentang sarana dan prasarana pendidikan. Narasumber adalah Bapak Sutrisno,S,Ag.M.Kom.I .selaku wakil ketua komite di MIN 1 Bandar Lampung. Dan ibu Kepala sekolah Desi Deria Herawati,S.Ag memberikan informasi keunggulan dari sekolah ini yaitu 4 tahun ini sarana dan prasarana memiliki kemajuan yang sangat pesat mulai dari pembangunan gedung, pengadaran sarana di dalam kelas dan juga 2 tahun ini sekolah telah resmi Berakreditasi A. Itu salah satu contoh keunggulan sekolah yang membuat peneliti ingin mendalami peran komite di sekolah MIN Bandar Lampung. Sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ini sudah cukup baik dan lengkap yaitu sudah memiliki 6 kelas yang terfasilitasi meja dan kursi yang sudah layak, papan tulis yang berkualitas, LCD / Proyektor, ruang rapat, kantor administrasi serta kantor kepala sekolah, dan sudah memiliki lapangan basket, lapangan futsal sudah cukup memadai.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan oleh peneliti di atas, maka fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peran komite sekolah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di MIN 1 Bandar Lampung.

Adapun sub fokus penelitian ini hanya memfokuskan pada **Peran Komite Madrasah di MIN 1 Bandar Lampung** adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Madrasah Sebagai Peran Pendukung (Suporrtng Agency) DI MIN 1 Bandar Lampung.
- 2.Peran Komite Madrasah Seabagai Mediator Di MIN 1 Bandar Lampung.

¹³ Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Konsep dan Aplikasinya*, , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).

D. Rumusan Masalah

Dari fokus dan sub focus diatas,maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Komite Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Di MIN 1 Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah Peran Komite Sebagai Mediator Di MIN 1 Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimanakah Peran Komite Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Di MIN 1 Bandar Lampung.
2. Untuk mendeskripsikan Bagaiamnakah Peran Komite Sebagai Mediator Di MIN 1 Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari pelaksanaan penelitian masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Bagi Komite Sekolah
Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi komite sekolah tentang pentingnya peran komite sekolah sebagai pengawas sebuah instansi pendidikan di MIN 1 Bandar Lampung.
2. Bagi Peneliti
Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti sebagai hasil pengalaman langsung khususnya tentang peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana di MIN 1Bandar Lampung.
3. Bagi MIN 1 Bandar Lampung
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumber daya guna perbaikan, pengalaman dan peningkatan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan sarana dan prasarana di MIN 1 Bandar Lampung.

4. Bagi Pembaca

Berguna sebagai sebuah informasi dan bahan masukan bagi perumusan konsep tentang peran komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan dan keberlangsungan sarana prasarana di MIN 1 Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Fadli Hasan NIM 1040182000657 Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah FITK yang berjudul Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 244 Jakarta tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode deskriptif kualitatif, dalam skripsi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui peran komite sekolah telah dilakukan oleh anggota komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang beracuan pada operasional Kegiatan dan Indikator Komite Sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 244 Jakarta sangat efektif. Perbedaan penelitian yang dilakukan Fadli Hasan dengan penulis adalah Objek penelitian pada tingkat MIN.¹⁴
2. Penelitian yang serupa lainnya dilakukan oleh Bodi Kurniawan Jurusan Pendidikan FTIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, penelitian ini hasil skripsi, yang berjudul “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta”, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah keberadaan komite sekolah di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta yang membantu pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dinilai berperan positif. Dan telah bekerja sama dengan masyarakat, orang tua, guru, pihak sekolah, serta instansi-instansi lainnya.

¹⁴ Fadli Hasan, “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 244 Jakarta Tahu 2011”, (Skripsi), UIN Syarif Hidayatullah FITK, 2011.

Komite sekolah telah mendukung sepenuhnya program sekolah, komite sekolah telah menjadi mediator bagi masyarakat dan sekolah. Namun program kerja komite sekolah belum 100 % tercapai. Yang membedakan skripsi penulis dengan Bodi Kurniawan terletak pada objek penelitiannya.¹⁵

3. Penelitian yang serupa selanjutnya dilakukan M. Mirhasan, Jurusan Manejemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019, penelitian ini hasil skripsi yang berjudul “Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, mutu pendidikan yang ada di MTS N 2 Bandar Lampung dapat dikatakan baik. Kemudian peran komite sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai badan pengontrol dan sebagai mediator telah melaksanakan perannya dengan optimal.¹⁶
4. Penelitian yang serupa selanjutnya dilakukan oleh Fitri Astuti, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO pada tahun 2017. Penelitian ini hasil skripsi yang berjudul “Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMA NEGERI 2 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan beberapa peran komite yakni: Sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol dan sebagai mediator.¹⁷

¹⁵ Bodi Kurniawan, “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta”. (Skripsi), UIN Syarif Hidayatullah FTIK, 2011.

¹⁶ M. Mirhasan, “Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung”, (Skripsi), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2019.

¹⁷ Fitri Astuti, berjudul “Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di SMA NEGERI 2 SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR”. (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO pada tahun 2017.

5. Penelitian yang serupa selanjutnya dilakukan oleh Desi Ulfiana Siregar, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara, pada tahun 2019. Penelitian ini hasil skripsi yang berjudul “Peran Komite Madrasah Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana di MTS NEGERI 2 MEDAN”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Komite dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana bekerja sama dengan pihak sekolah.¹⁸

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Dari istilah itu ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai *riset*. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari *research* atau *riset* adalah “mencari kembali”.

Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan amat cerdas untuk menetapkan sesuatu.

Menurut ilmuwan Hillway, penelitian tak lain dari suatu metode studi hati sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang terhadap masalah tersebut. Whitney, menyatakan bahwa di samping untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidiki harus dilakukan secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Dengan demikian penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga

¹⁸ Desi Ulfiana Siregar, “Peran Komite Madrasah Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana di MTS NEGERI 2 MEDAN”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara, 2019.

¹⁹ Sugiyono, *Manajemen Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 17.

penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis dan sistematis.²⁰

Penelitian menurut Cholid Narbuka adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.”²¹ Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah: sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha-usaha yang dilakukan dengan cara menggunakan metode-metode ilmiah.

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, bahwasannya metode penelitian adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Sehubungan dengan uraian diatas, ini disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya. Maka laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian data lapangan. Data tersebut mungkin berasal dari catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen resmi lainnya.

1.Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal dan tempat yaitu:

Nama Sekolah:MIN 1 Bandar Lampung

Staus Sekolah:Negeri

Alamat Sekolah:Jl. Teuku Umar,Gg.Gajah No.2,
Kel.Sidodadi, Kec.Kedaton, Kota Banadar Lampung

²⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 1.

²¹ Cholid Nabuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 1.

2. Pendekatan Jenis Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan mendapatkan data yang lengkap, tersistematis, teruji, valid dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Desain penelitian kualitatif ada empat tahapan yakni:

- a. Perencanaan dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan rencana penelitian, penyusunan instrumen penelitian dan tempat penelitian.
- b. Pelaksanaan Peneliti pada tahap ini adalah sebagai pelaksana sekaligus sebagai human instrument yang mencari informasi data, yakni melakukan wawancara dengan komite dan waka sarana prasarana . Lalu peneliti juga secara langsung mengobservasi keadaan sarana prasarana dan mengumpulkan data berupa dokumen terkait penelitian.
- c. Analisis Data Setelah data-data yang terkait penelitian terkumpul dan setelah peneliti mewawancarai ketua komite, waka sarana prasarana dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian, maka dapat dilakukan analisis data.
- d. Evaluasi Data Setelah data-data yang terkait dengan penelitian di MIN 1 Bandar Lampung yang telah dianalisis, lalu dievaluasi ditinjau kembali sehingga diketahui tingkat hasil dan dampak yang ditimbulkan.

3. Partisipasi dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk meneliti MIN 1 Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan dan alasan, pertama bahwa MIN 1 Bandar Lampung merupakan sebuah lembaga di bawah naungan yayasan Muhammadiyah dan memiliki kemajuan yang signifikan secara fisik setiap tahunnya. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Ketua Komite, Guru MIN 1 Bandar Lampung

4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data, dan

bersumber pada data tersebut peneliti dapat melakukan analisis yang pada akhirnya peneliti akan mendapatkan substansi yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah penelitian. Dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Pengertian observasi secara terminologis dimaknai sebagai pengamatan atau peninjauan secara cermat. Menurut Nasution, bahwa observasi adalah merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Bapak Sutrisno, mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.²² Jadi observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²³ Menurut Bapak Sutrisno, mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 204).

²³ Abd. Rahman A. Ghani, *Metodologi Penelitian Tindakan Madrasah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014).

menggunakan metode interview dan juga dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
 - b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
 - c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penelitian kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
- c. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi adalah sejumlah besar data yang tersedia adalah data verbal yang terdapat dalam surat-surat, format-format, catatan harian (jurnal), kenangan-kenangan (memoris), laporan-laporan dan sebagainya. Kumpulan data verbal ini disebut dokumen dalam arti yang sempit. Sedangkan dalam arti yang luas meliputi monumen, artefak, foto, tips, dan lain sebagainya.²⁴ Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dokumen yang terdapat pada MIN 1 Bandar Lampung yaitu seperti keadaan tanah dan bangunan madrasah, fasilitas-fasilitas di madrasah, daftar guru, dan karyawan, keadaan siswa, struktur organisasi, dan data-data tertulis yang berhubungan dengan mengembangkan sekolah.

5. Prosedur Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dilakukan ada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pada hubungan tertentu. Pengertian analisis data menurut Patton, yaitu suatu proses mengatur urutan

²⁴ Koentjara Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1994), h. 46).

data, mengorganisasikannya suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah--langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses analisis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁵ Menurut Nasution, Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek tertentu
- b. Penyajian Data Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan.
- c. Verifikasi Data, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpul data selanjutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bervariasi.
- d. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksikan dan manafsirkan data untuk menggambarkan secara mendalam dan untuk mengenai masalah yang diteliti. Setelah data hasil penelitian

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.

terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan berfikir induktif, yaitu kesimpulan yang tertarik atas dasar data empiris setelah sebelumnya dilakukan verifikasi data. Dengan data lain, dalam metode penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertulis.²⁶

4. Uji Keabsahan Data

Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti harus dipertanggungjawabkan keabsahannya, karena tidak mungkin dalam melakukan sebuah penelitian tidak diadakannya sebuah pengecekan ulang oleh peneliti, maka dari itu yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pemeriksaan ialah keabsahan datanya. Untuk menentukan keabsahan suatu data diperlukan sebuah teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *depenbality* (keberantungan), dan *confirmability* (kepastian).²⁷ Uji keabsahan data data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Dalam pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian ada beberapa cara. Cara yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi.

²⁶ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensido Offset, 1999), h. 86.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.27.

Triangulasi dalam pengujian kreabilitas ini diartikan sebagai pengecekan suatu data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi waktu, dan triangulasi teori.

Berikut penjelasan dari berbagai jenis triangulasi dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kreabilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (meber check) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pegujian kreabilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreabilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kreabilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah mengecek kembali data dengan teknik yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari ketua komite akan dibandingkan dengan data waka sarana prasarana. Sedangkan triangulasi data yang di dapat menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB ini memuat uraian tentang teori-teori yakni peran komite sebagai pendukung dan peran komite sebagai mediator.

²⁸ Sugiono, *Ibid.* h. 141."

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

BAB ini memuat uraian secara rinci gambaran objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

BAB ini berisi (1). Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan berisi tentang temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

BAB ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misal disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komite Sekolah

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan Pendidikan di satuan Pendidikan, baik pada Pendidikan pra sekolah, jalur Pendidikan sekolah maupun jalur di luar sekolah.²⁹

Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang dapat dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut yaitu komite sekolah.³⁰

Peran komite sekolah dalam mendukung program sekolah dapat berupa tenaga, saran, masukan, kritik serta dukungan yang direalisasikan dalam bentuk program komite sekolah sebagai pendukung dan sebagai mediator.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komite. Karena sejatinya komite sekolah harus menjembatani dengan baik antara pihak sekolah dengan komite, ditambah dengan masyarakat sekitar khususnya orang tua siswa. Kerjasama antara pihak sekolah, komite sekolah, ditambah dengan dukungan orang tua siswa yang baik akan berdampak positif bagi sekolah.

Melalui paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan Pendidikan pada masing-masing sekolah, dengan kondisi seperti itu, komite

²⁹ Kepmendiknas nomor: 044/U/2002.

³⁰ I Putu Eka Amerta, "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan" (Jurnal), FKIP UNILA, h. 2."

sekolah diharapkan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai patner dari kepala sekolah, untuk mengelola berbagai sumber daya Pendidikan yang ada dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan peningkatan mutu Pendidikan, memberikan fasilitas dan dukungan bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran menjadi efektif.³¹

Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari *School Based Management*, yaitu pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya dilakukan secara mandiri oleh sekolah daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional. Konsep MBS dalam pengelolaan Pendidikan bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemiliknya yaitu masyarakat, yang diharapkan akan merasa bertanggung jawab kembali sepenuhnya terhadap Pendidikan yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan.³²

Manajemen berbasis sekolah juga adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Artinya MBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada masing-masing sekolah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. MBS juga adalah penataan sistem Pendidikan yang meberikan keleluasaan penuh kepada kepala sekolah dan atas kesepakatan seluruh stafnya, untuk memanfaatkan sumber belajar dan semua fasilitas yang tersedia untuk menyelenggarakan Pendidikan bagi siswa, serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya.³³

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

Dalam peranannya sebagai badan pendukung (*supporting agency*), melalui koordinasi dengan Dewan Pendidikan, komite sekolah diharapkan mendapat gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di beberapa sekolah secara keseluruhan, khususnya terkait dengan masalah tenaga kependidikan. Hal ini dimaksudkan agar kekurangan tenaga kependidikan pada beberapa sekolah di suatu daerah tidak dibiarkan terus terjadi sehingga akan mengganggu pelaksanaan pendidikan. Komite sekolah kemudian dapat menindaklanjuti dengan melakukan pemberdayaan guru sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, disekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga pendidikan.

Komite sekolah juga dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang ada dalam masyarakat, yang dapat dimanfaatkan sekolah. Dengan demikian, aspek integrasi sekolah dengan masyarakat yang selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dapat diatasi, karena masyarakat dapat terlibat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Sarana dan prasarana sebagai bagian dari pelaksanaan proses pendidikan, juga harus mendapat perhatian penting. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai tentu akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu komite sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tahap selanjutnya, tentu komite sekolah akan memberdayakan bantuan sarana prasarana yang telah dilakukan komite sekolah dengan koordinasi pada Dewan Pendidikan akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut.

Peran komite sekolah sebagai pendukung baik dalam pencapaian tujuan maupun peningkatan mutu sekolah sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan dengan perannya sebagai pendukung seperti: pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah maupun program kegiatan sekolah.

- a. Mengajak wali murid untuk mengikuti rapat Madrasah
- b. Menggalang dana untuk pengelola pendidikan
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu

Dukungan yang diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan Pendidikan di sekolah bisa berupa bentuk materil, materil disini dalam bentuk barang misalnya; penambahan computer, pemberian buku-buku pelajaran untuk melengkapi perpustakaan, komite juga memberikan dukungan moril kepada semua pihak sekolah supaya lebih mengembangkan Pendidikan.

Selain dukungan Materil pihak komite sekolah juga melakukan bentuk dukungan yang lain yakni berupa pemantauan terhadap kondisi dari pada tenaga pendidik atau guru dan non pendidik dalam hal ini staf karyawan merupakan dukungan moril yang diberikan komite sekolah, selain itu dukungan yang diberikan juga berupa pemantauan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Melakukan koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah, memantau kondisi anggaran Pendidikan sekolah, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah.³⁴

Untuk memenuhi fungsinya sebagai pendukung, diperlukan program dan kegiatan serta dukungan dana dan sarana prasarana Pendidikan agar mampu memenuhi harapan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam proses Pendidikan. Terpenuhinya sarana dan prasarana Pendidikan akan mampu meningkatkan pelaksanaan proses Pendidikan, meningkatkan mutu Pendidikan itu sendiri yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa Pendidikan. Oleh karena itu komite sekolah harus berperan dalam memfasilitasi kebutuhan sarana

³⁴ Siska Yuni Larasati, "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan DI SMA Ronggolawe Kota Semarang", (Skripsi), Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009, h. 52.

dan prasarana Pendidikan di sekolah dengan memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat.³⁵

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan merupakan upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan melalui peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung keterlaksanaan proses Pendidikan. Sarana dan prasarana Pendidikan seperti Gedung sekolah, alat dan media pembelajaran, sumber daya manusia dan lain sebagainya yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar harus terpenuhi dengan baik.³⁶

Pendidikan adalah upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan dan peningkatan potensi peserta didik. Inti dari Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran. Untuk itu perlu adanya program dan dukungan untuk melaksanakannya. Kegiatan penggalangan dana untuk Pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik, hal ini terlihat dengan dilaksanakannya konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dana Pendidikan oleh komite sekolah.³⁷

Hal ini dimaksudkan agar siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah dengan bantuan dari siswa dari keluarga yang lebih mampu, sehingga ada siswa yang membayar 25 %, 50 %, 75 %, dari jumlah iuran dana Pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar. Hal ini dilakukan pihak komite untuk menunjukkan perannya sebagai badan pendukung (*supporting agency*). Dengan mendukung pelaksanaan kegiatan program sekolah dan Untuk memenuhi fungsinya sebagai pendukung, diperlukan program dan kegiatan serta dukungan dana dan sarana prasarana Pendidikan agar mampu memenuhi harapan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam

³⁵ I Putu Eka Amerta, "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan" (Jurnal), FKIP UNILA, h. 9.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

proses Pendidikan. Terpenuhinya sarana dan prasarana Pendidikan akan mampu meningkatkan pelaksanaan proses Pendidikan, meningkatkan mutu Pendidikan,

Hal ini dimaksudkan agar siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah dengan bantuan dari siswa dari keluarga yang lebih mampu, sehingga ada siswa yang membayar 25 %, 50 %, 75 %, dari jumlah iuran dana Pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar. Hal ini dilakukan pihak komite untuk menunjukkan perannya sebagai badan pendukung (*supporting agency*). Dengan mendukung pelaksanaan kegiatan program sekolah dan

1. Pengertian Komite Sekolah

Dalam lampiran II Kepmendiknas No. 044 Tahun 2002 Komite Sekolah didefinisikan sebagai: “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.”³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 dijelaskan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.³⁹

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 1 dijelaskan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik komunitas

³⁸ Engkoswara dkk, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 296-297 .

³⁹ Rugaiyah dan Atiek Sismiati, *Profesi Kependidikan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Hlm. 74.

sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.⁴⁰

Dari pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komite sekolah atau dewan sekolah adalah suatu badan yang tidak memiliki hubungan struktural dan admistri dengan pemerintahan dan sebagai badan yang mewakili masyarakat yang bertugas untuk mewedahi peran serta masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, serta efisiensi pengelolaan pendidikan disekolah. Dewan sekolah atau komite sekolah dibentuk berdasarkan musyawarah oleh para stakeholder disekolah. Komite sekolah terdiri dari: orang tua siswa, wakil siswa, wakil-wakil guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat, wakil pemerintah daerah, dan utusan dari dinas pendidikan. Keberadaan komie sekolah sangat penting yaitu sebagai kekuatan sekolah untuk dapat bekerjasama guna menciptakan sekolah yang berkualitas. Pada saat ini, kondisi komite sekolah sangat beragam, ada yang ingin memiliki kantor disekolah, ada yang selalu mengawasi kepala sekolah, bahkan tidak sedikit komite sekolah yang mencari makan disekolah. Hal ini terjadi karena pemahaman kita terhadap komite sekolah sangat beragam.⁴¹

Maksud dari beragam disini adalah kenyataan yang terjadi adalah tidak sedikit komite sekolah yang memiliki kepentingan yang berbeda setiap individunya. Dan dalam kenyataannya, masih banyak komite sekolah yang belum mandiri dalam hal pencarian dana dan masih mengandalkan dana yang diberikan oleh pemerintah. Namun, diharapkan tujuan komite sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan disekolah tetap terealisasikan dengan baik. Dewan

⁴⁰ *Permendikbud RI No.75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah*, (Jakarta:2016), Hlm.4.

⁴¹ H.E Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Ed. 1 Cet. 3 hlm. 127.

sekolah dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosiodemografis dan nilai-nilai masyarakat setempat, sehingga otonomi dewan sekolah bersifat otonom yang menganut kebersamaan yang menuju kearah peningkatan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan peserta didik yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.⁴²

2. Tujuan Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya komite sekolah adalah: Menurut H.E.Mulya dalam bukunya Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah tujuan dari didirikannya komite sekolah adalah: pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan perkara masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan dimadrasah. Kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. Ketiga, menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu dalam sekolah.⁴³

Pembentukan dewan sekolah atau komite sekolah disetiap tempat disesuaikan dengan nilai kesepakatan dan kepercayaan serta potensi yang ada dimasyarakat itu sendiri. Adanya komite sekolah harus berlandaskan pada partisipasi aktif dari masyarakat guna meningkatkan kualitas sekolah dan tercapainya tujuan dari sekolah. Sedangkan menurut Nanang Fattah dalam bukunya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan menjelaskan bahwa tujuan pembentukan dewan sekolah adalah:

- 1) Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholder pendidikan pada tingkatsekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan,

⁴² Nanang fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya,2012) hlm. 146.

⁴³ H.E Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Ed. 1 Cet. 3 hlm.128.

melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara profesional dan terbuka.

- 2) Mewadahi partisipasi masyarakat para stakeholder yang turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional.
- 3) Mewadahi partisipan, baik individu maupun kelompok sukarela (voluntir) pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli pada kualitas pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan sekolah.
- 4) Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan ditingkat daerah.⁴⁴
- 5) Peran dan Fungsi Komite Sekolah Selain memiliki tujuan, komite sekolah juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan disuatu sekolah. Dalam lampiran II Kepmendiknas No. 044 tahun 2002 dijelaskan peran komite sekolah adalah:
 - a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan.
 - b) Pendukung (Supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
 - c) Pengontrol (Controlling agency) dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas

⁴⁴ Nanang fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya,2012) hlm.150.

penyelenggraan dan keluaran pendidikan disatukan pendidikan.

- d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat disatukan pendidikan.⁴⁵

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap komite sekolah harus mengetahui peran yang harus dijalankannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol dan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk meningkatkan peran masyarakat, maka penting bagi pihak MIN 1 Bandar Lampung untuk menjalin kerjasama anatar pihak sekolah, orang tua dan juga masyarakat. Sehingga akan terjalin hubungan yang kondusif. Sejalan dengan peran komite sekolah, terdapat pula fungsi komite sekolah yaitu:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggraan pendidikan yang bermutu disekolah.
- 2) Melakuka kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh mayarakat.

⁴⁵ Engkoswara dan Aan komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2012), Hlm.299.

- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepala sekolah mengenai: kebijakan program pendidikan; Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBM); kriteriakinerja sekolah; kriteria tenaga kependidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disekolah.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan disekolah.⁴⁶ Dari ketujuh fungsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi komite sekolah secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat, orang tua dan semua yang terkait didalamnya guna sama-sama meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di MIN 1 Bandar Lampung.

⁴⁶ H.E Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Ed. 1 Cet. 3hlm. 128-129.

3. Tugas Komite Sekolah

Tugas-tugas dari komite sekolah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai program yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
2. Bersama-sama dengan pihak sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi sekolah
3. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah.]
4. Bersama sekolah menyusun rencana strategis pengembangan sekolah.
5. Bersama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program sekolah tahunan termasuk RAPBM.
6. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honorium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Bersama sekolah mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan baik bersifat akademis maupun non akademis.
8. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
9. Mengelola kontribusi masyarakat berupa non-material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada sekolah.
10. Mengevaluasi program sekolah secara proporsional sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah.
11. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkan bersama-sama pihak sekolah.
12. Memberikan respons terhadap kurikulum yang dikembangkan secara terstandar nasional maupun lokal.
12. Memberikan motivasi, penghargaan kepada tenaga pendidikan maupun seseorang yang berjasa kepada

sekolah. Yang berarti pihak komite berfungsi memberikan sebuah reward seseorang yang berjasa terhadap sekolah.

13. Memberikan otonomi profesional kepada pendidik mata pelajaran dalam melakukan tugas-tugas kependidikannya sesuai kaidah dan kompetensi guru.
14. Membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar sekolah. Selain menjalin dengan pihak internal sekolah, pihak komite juga berfungsi menjalin hubungan dengan pihak eksternal sekolah seperti masyarakat sekitar sekolah.
15. Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Pihak komite harus mengecek atau mengontrol setiap pelayanan yang berjalan di sekolah.
16. Mengkaji laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan kepala sekolah.
17. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah.⁴⁷

Dari sekian banyak tugas yang harus dijalankan oleh komite sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tugas komite sekolah secara keseluruhan adalah membantu pihak sekolah dalam bentuk finansial, tenaga, maupun pikiran untuk sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Relevandengan fokus tugas komite sekolah, Duhou dalam buku Dede Rosyada menjelaskan salah satu pengalaman tentang sekolah yng menjalankan SBM disalah satu sekolah diAustralia yakni Victoria's school, dan dinamai dengan SOF atau School of Future, memaparkan bahwa tugas-tugas yang

⁴⁷ H.E Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala sekolah*, (Jakarta: BumiAksara, 2013) Ed. 1 Cet. 3hlm. 135-137.

dikembangkan untuk komite sekolahnya adalah sebagai berikut:

1. Komite sekolah terlibat dalam membuat dan menyusun berbagai kebijakan pendidikan dari sekolahnya
2. Menirikan komite pendidikan tingkat regional, dan mendorong keterwakilan tiap sekolah pada komite regional tersebut.
3. Pada komite regional diperkuat dengan expert dalam bidangbidang yang diperlukan dan komite tersebut independent tidak terikat dengan birokrasi pendidikan, namun bertanggung jawab dengan menteri.⁴⁸
4. Anggota dan Kepengurusan Komite Sekolah
5. Keanggotaan komite sekolah sebagaimana dijelaskan Mulyasa dalam bukunya yang berjudul “Manajemen dan Kepemimpinan” terdiri atas 3 unsur yaitu unsur masyarakat (orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga kependidikan, wali alumni), unsur komite guru, yayasan/lembaga penyelenggaran pendidikan, serta bagan pertimbangan desa juga dapat dilibatkan sebagai anggota komite sekolah. Anggota komite sekolah berjumlah sekurangkurangnya 9 orang dan jumlahnya gasal.⁴⁹
6. Pengurus Komite Sekolah, Kepengurusan komite sekolah sebagaimana dijelaskan Nanang Fattah dalam bukunya yang berjudul “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ”keanggotaany terdiri dari ketua, sekretaris

⁴⁸ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 276-277.

⁴⁹ H.E Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013) Ed.1 Cet.3 hlm.129.

dan seksi-seksiyang dapat dikembangkan Pengurus komite sekolah dipilih berdasarkan hasil pemilihan secara demokratis anggota mitra sejajar tidak diperbolehkan menjadi pengurus komite sekolah. Dalam hal administrasi komite sekolah, dapat ditunjuk dari luar anggota komite dan pembiayaan kegiatan komite sekolah dapat diambil dari anggaran komite yang sudah ditetapkan melalui musyawarah bersama. Jika dalam kepengurusan komite sekolah terdapat komite yang tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan menggantinya dengan kepengurusan baru.⁵⁰ Dari yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepengurusan komite seklah terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang dapat dikembangkan. Namun, juga disesuaikan dengan jumlah komite sekolah yang ada. Karena, jumlah komite sekolah disetiap satuan pendidikan berbeda-beda.

6. Proses Pembentukan Komite Sekolah

Proses pembentukan komite sekolah yang dijelaskan oleh Nanang Fattah dalam bukunya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, dijelaskan terdapat 3 tahapan dalam pembentukan komite sekolah yaitu:

Pertama, tahap persiapan yang dimulai dari membentuk panitia persiapan pembentukan komite sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah dibantu oleh staf sekolah. Persiapan ini dilakukan dengan langkah-langkah mengadakan survey mengenai potensi wilayah sekolah setempat, melakukan analisis posisi

⁵⁰ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2012) hlm. 157.

sekolah, mengadakan sosialisasi, menyusun tata cara pemilihan anggota komite sekolah dan menyebarkannya, mengirim surat permintaan calon anggota komite sekolah kepada setiap unsur anggota komite sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, mengirim surat permintaan kesediaan calon anggota komite sekolah, serta memuat daftar calon anggota komite sekolah yang bersedia untuk dipilih dan menyebarkannya kepada pemilih.

Tahapan selanjutnya adalah pemilihan anggota dan pengurus komite sekolah. Pemilihan anggota dan pengurus komite sekolah harus dilakukan secara jujur dan terbuka melalui pemilihan suara. Jika terdapat penyimpangan dalam penghitungan dan penghitungan suara, maka pemilihan dapat diulang. Tahapan yang terakhir adalah penetapan anggota dan pengurus komite sekolah. Penetapan anggota komite dilihat melalui dukungan atau suara terbanyak. Calon anggota yang memiliki suara atau dukungan terbanyak langsung terpilih menjadi anggota komite sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati. Pengesahan anggota komite sekolah dilakukan melalui musyawarah bersama.⁵¹

Peningkatan Kontribusi dan Partisipasi Masyarakat MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) memerlukan kemitraan dengan masyarakat yang memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Pemberdayaan partisipasi masyarakat diwadahi dengan pembentukan Dewan/Komite Sekolah yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan stakeholder sekolah, serta badan yang berfungsi untuk membantu sekolah meningkatkan kinerjanya bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar bermutu.¹⁸ Jadi, manajemen berbasis sekolah membutuhkan kerjasama dengan masyarakat

⁵¹ Ibid h. 158-159.

secara langsung. Kerja sama ini dimaksudkan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan.

Karena, dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat diharapkan layanan pendidikan akan semakin baik dan terus berkembang. Sejatinya masyarakat adalah bagian yang paling dekat dengan sekolah. Jenis masyarakat yang dijalin sekolah untuk bekerjasama adalah kelompok orang tua, kelompok asosiasi, kelompok praktisi, kelompok akademisi, kelompok pengusaha, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Keberadaan mereka sangat diperlukan agar berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan partisipasi. Peran serta masyarakat dapat memberi kontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran, keahlian, barang, dana dan lainnya yang dapat diberikan kepada sekolah. Setelah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak berkepentingan, sesuai kesepakatan diantara mereka, maka sekolah dapat memperoleh kontribusi tunai yang bisa diberikan dalam bentuk dana hibah, pemberian beasiswa atau program orang tua suh dan sekolah asuh. Bagi sekolah yang tidak mungkin lagi untuk meminta bantuan dari pihak orang tua murid karena kondisi ekonomi mereka yang sangat sulit, sedangkan alokasi dana yang diterima pemerintah tidak mampu memenuhi operasional sekolah.

Dalam hal keadaan demikian, maka kepala sekolah, guru dan komite sekolah duduk bersama untuk memikirkan alternatif apa yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan pengembangan sekolah. Salah satu alternatif sekolah dapat memilih untuk melakukan pendekatan kepada perusahaan terdekat sekolah misalnya telkom atau lainnya. Keputusan ini juga dilaporkan kepada pengawas atau camat atau siapa saja yang dapat membuka akses komunikasi

dengan perusahaan tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena keterbatasan sekolah untuk membuka akses komunikasi dengan perusahaan. Uphoff dalam Nanang Fattah mengemukakan bahwa kerangka kerja merekonstruksi partisipasi mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan, dan lingkungan.

Selanjutnya dikaitkandengan pembangunan negara berkembang, perlu adanya pengembangan partisipasi meliputi (i) partisipasi dalam mengambil keputusan, (ii) partisipasi pelaksanaan, (iii) partisipasi memperoleh keuntungan, (iv) partisipasi dalam mengevaluasi. Syaiful Sagala dalam bukunya Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan menjelaskan bahwa sekolah bersama komite sekolah perlu menetapkan stakeholders dan juga mengidentifikasi apa saja yang kiranya dapat dibantu oleh stakeholder tersebut untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Selain untuk penjangkaran informasi mengenai stakeholders, dewan pendidikan dan komite sekolah bersama sekolah perlu menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat.

4. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah

Komite sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, yaitu sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah baik sekolah negeri maupun swasta. Pada setiap sekolah terdapat suatu komite sekolah. Dalam hal terdapat beberapa sekolah pada satu lokasi, atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi berdekatan, atau beberapa sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk kordinator komite sekolah.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah

lainnya. Komite sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen berbasis sekolah (MBS).⁵²

5. Prinsip Pembentukan Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan kepanitian. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dilakukan secara berkeadilan adalah dengan perwakilan masyarakat. Sekolah atau lainnya secara proporsional dan adil. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

6. Mekanisme

Pembentukan komite sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh

⁵² Departemen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003, h. 11-12.

agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan komite sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3; Majelis Sekolah dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.
2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat
3. Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat
4. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat
5. Menyusun nama-nama terpilih
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah
7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala satuan pendidikan
8. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah terbentuk

7. Penetapan

Calon anggota komite sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara banyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah. Pengurus dan anggota Komite terpilih

dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, komite sekolah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat.⁵³

B. Hubungan Sekolah dengan Komite

Sekolah bukanlah sebuah lembaga yang terpisah dari masyarakat karena sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial yang mengambil siswanya dari masyarakat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan.

Kindred Leslie yang di kutip oleh Piet mengatakan hubungan sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan dari praktek pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah.⁵⁴

Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua murid dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan. Lebih lanjut oleh Wahjosumijo tujuan pokok pengembangan hubungan efektif dengan masyarakat adalah untuk memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan sekolah.⁵⁵

⁵³ Ibid h. 16-22.

⁵⁴ Piet Sahertian, *Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah*. (Surabaya, Usaha Nasional, 1994) Cet. 1 h.233.

⁵⁵ Wahjosuidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010) Cet. 1 h. 334.

Maka dari pendapat tersebut menekankan komunikasi antara sekolah dan masyarakat sangat diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh Kindred Leslie yang dikutip oleh Mulyono menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat tentang kebutuhan dari praktik pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah.⁵⁶

Adanya komunikasi yang baik diharapkan akan terciptanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah yang saling bersinergis. Menurut Syaiful segala hal tersebut akan mampu mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dan menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.⁵⁷

Agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan dan produktif. Berikut beberapa hasil yang diharapkan dengan terciptanya hubungan yang harmonis:

- 1) Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.
- 2) Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya.
- 3) Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak. Karena hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan

⁵⁶ Mulyono Op., Cit. h. 208.

⁵⁷ Syaiful Sagala. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. (Bandung, Alfabeta 2013), Cet.4 h.251.

dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan financial. Oleh karena itu pentingnya peningkatan intensitas dan eksistensi hubungan sekolah dengan masyarakat.

Menurut Mulyasa hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Memajukan mutu pembelajaran dan pertumbuhan anak
- 2) Memperkokoh tujuan serta meningkatkan mutu hidup dan penghidupan masyarakat
- 3) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.⁵⁸

C. Peran Komite Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)

Peran komite sekolah sebagai pendukung baik dalam pencapaian tujuan maupun peningkatan mutu sekolah sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan dengan perannya sebagai pendukung seperti: pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah maupun program kegiatan sekolah.

- d. Mengajak wali murid untuk mengikuti rapat Madrasah
- e. Menggalang dana untuk pengelola pendidikan
- f. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu

Dukungan yang diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan Pendidikan di sekolah bisa berupa bentuk materil, materil disini dalam bentuk barang Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan merupakan upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan melalui peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung keterlaksanaan proses Pendidikan. Sarana dan prasarana Pendidikan seperti Gedung sekolah, alat dan media pembelajaran, sumber daya manusia dan lain sebagainya yang

⁵⁸ Veitzal Rivai dan Sylviana Murni. Education Management. (Jakarta. Grafindo, 2009) Ed. 1 h.168.

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar harus terpenuhi dengan baik.⁵⁹

Pendidikan adalah upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan dan peningkatan potensi peserta didik. Inti dari Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran. Untuk itu perlu adanya program dan dukungan untuk melaksanakannya. Kegiatan penggalangan dana untuk Pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik, hal ini terlihat dengan dilaksanakannya konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dana Pendidikan oleh komite sekolah.⁶⁰

Hal ini dimaksudkan agar siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah dengan bantuan dari siswa dari keluarga yang lebih mampu, sehingga ada siswa yang membayar 25 %, 50 %, 75 %, dari jumlah iuran dana Pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar. Hal ini dilakukan pihak komite untuk menunjukkan perannya sebagai badan pendukung (*supporting agency*). Dengan mendukung pelaksanaan kegiatan program sekolah dan Untuk memenuhi fungsinya sebagai pendukung, diperlukan program dan kegiatan serta dukungan dana dan sarana prasarana Pendidikan agar mampu memenuhi harapan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam proses Pendidikan. Terpenuhinya sarana dan prasarana Pendidikan akan mampu meningkatkan pelaksanaan proses Pendidikan, meningkatkan mutu Pendidikan itu sendiri yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa Pendidikan. Oleh karena itu komite sekolah harus berperan dalam memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan di sekolah dengan memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat.⁶¹

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ I Putu Eka Amerta, "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan" (Jurnal), FKIP UNILA, h. 9.

misalnya; penambahan computer, pemberian buku-buku pelajaran untuk melengkapi perpustakaan, komite juga memberikan dukungan moril kepada semua pihak sekolah supaya lebih mengembangkan Pendidikan.

Selain dukungan Materil pihak komite sekolah juga melakukan bentuk dukungan yang lain yakni berupa pemantauan terhadap kondisi dari pada tenaga pendidik atau guru dan non pendidik dalam hal ini staf karyawan merupakan dukungan moril yang diberikan komite sekolah, selain itu dukungan yang diberikan juga berupa pemantauan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Melakukan koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah, memantau kondisi anggaran Pendidikan sekolah, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah.⁶²

Untuk memenuhi fungsinya sebagai pendukung, diperlukan program dan kegiatan serta dukungan dana dan sarana prasarana Pendidikan agar mampu memenuhi harapan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam proses Pendidikan. Terpenuhinya sarana dan prasarana Pendidikan akan mampu meningkatkan pelaksanaan proses Pendidikan, meningkatkan mutu Pendidikan itu sendiri yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa Pendidikan. Oleh karena itu komite sekolah harus berperan dalam memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan di sekolah dengan memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat.⁶³

⁶² Siska Yuni Larasati, "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan DI SMA Ronggolawe Kota Semarang", (Skripsi), Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009, h. 52.

⁶³ I Putu Eka Amerta, "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan" (Jurnal), FKIP UNILA, h. 9.

D. Peran Komite Sebagai Mediator

Dalam peranannya sebagai mediator, komite sekolah berfungsi sebagai penghubung sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan dinas pendidikan. Berbagai persoalan yang sering dialami orang tua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya seringkali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspons sekolah. Oleh karena itu, kehadiran komite sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orangtua tersebut.

Peran sebagai mediator dilakukan komite sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan sekolah. Peran ini antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan. Masukan ini tentu akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan. Bagi komite sekolah, hasil penyempurnaan kebijakan dan program tersebut juga harus di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga terjadi umpan balik (*feed back*) bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan di daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat akuntabel kepada masyarakat.

Peran komite sekolah sebagai mediator atau penghubung yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Oleh karena itu, dengan adanya komite sekolah diharapkan dapat menjalin dan menjaga silaturahmi yang baik antara dengan orang tua siswa.

- a. Bekerja sama dengan masyarakat
- b. Menampung segala ide dan aspirasi dari masyarakat

Sebagaimana diketahui, salah satu peran komite sekolah adalah sebagai mediator. Pada awalnya komite sekolah menampung aspirasi masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program Pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada

instansi terkait dalam bidang Pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga menjadi penghubung antara sekolah dengan dewan Pendidikan, komite sekolah sebagai mediator juga sering mengadakan diskusi antara pihak sekolah dengan perwakilan wali murid.⁶⁴

Mediator itu dengan kata lain bisa dikatakan sebagai penghubung, sejauh ini komite sekolah bisa menjadi penghubung antara sekolah dengan wali murid dan antara sekolah dengan dewan Pendidikan untuk menyampaikan aspirasi. Kerap kali melakukan rapat Bersama untuk membahas masalah yang tentunya berhubungan dengan sekolah ini.⁶⁵

Sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah untuk mendukung kebijakan Pendidikan di satuan Pendidikan sehingga dapat meningkatkan manajemen mutu di sekolah. Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerja sama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh orang terkait. Keberadaan komite sekolah diharapkan mampu menjembatani berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah dan orang tua atau wali murid, sehingga program-program dan kegiatan sekolah dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Peran komite sekolah sebagai badan penghubung antara sekolah dan masyarakat, sekolah dengan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan. Peran komite sekolah sebagai badan penghubung di MIN 1 Bandar Lampung adalah membantu sekolah menciptakan hubungan dan Kerjasama dengan orang tua dan masyarakat.⁶⁶

Peran komite sekolah sebagai penghubung dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan dilakukan tidak

⁶⁴ Siska Yuni Larasati, "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan DI SMA Ronggolawe Kota Semarang", (Skripsi), Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009, h. 55.

⁶⁵ Ibid, h 55.

⁶⁶ I Putu Eka Amerta, "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan" (Jurnal), FKIP UNILA, h..

hanya antara orang tua murid dengan sekolah, tetapi juga hubungan dengan dunia usaha atau dunia industry maupun dengan alumni. Ihwal ini diharapkan menjadi jembatan untuk meningkatkan Kerjasama dalam membangun Pendidikan di MIN 1 Bandar Lampung.⁶⁷



⁶⁷ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman A. Ghani, 2014. *Metodologi Penelitian Tindakan Madrasah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bertrand Alvin L, “Sosiologi: Kerangka Acuan, Metode Penelitian, Teori Sosialisasi, Kepribadian dan Kebudayaan”, (Bina Ilmu, 1980).
- Bodi Kurniawan, “Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta”. (Skripsi), UIN Syarif Hidayatullah FTIK, 2011.
- Cholid Nabuko dan Abu Ahmadi, 2015. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Dede Rosyada, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Prenada Media).
- Departemen Agama RI. *Pedoman Komite Sekolah* (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam). 2003, h. 11-12.
- Engkoswara. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fadli Hasan, “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 244 Jakarta Tahun 2011”, (Skripsi), UIN Syarif Hidayatullah FITK, 2011.
- Gibson, “Organisasi Perilaku- struktur-proses, Terjemahan, Edisi V” (Jakarta, Erlangga, 2002).
- H.E Mulyasa, 2013. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara) Ed. 1 Cet. 3.
- Kaelan, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma).
- Koentjara Ningrat, 1994. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama).
- Lajnah Pentashih Mushaf Alquran dan Tafsirnya. Jakarta: Menara Kudus, 1985. An Nahl 68-69.
- M. Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. (Insania Vol. 14 No. 1 januari-download.portalgaruda.org/article.php).
- Matin dan Nurhattati Fuad, 2006. *Manajemen Sarana dan Prasarana Konsep dan Aplikasinya*, , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mulyono Op., Cit. h. 208.

Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensido Offset.

Nanang fattah, 2012. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya).

Nili Hayani, 2014. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, April.

Permendikbud RI No.75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, (Jakarta).

Permendikbud RI No.75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, (Jakarta:2016),

Piet Sahertian, *Dimensi-Dimensi Adminstrasi Pendidikan Di Sekolah*. (Surabaya, Usaha Nasional, 1994) Cet. 1 h.233.

Rugaiyah dan Atiek Sismiati, 2011. *Profesi Kependidikan*, (Bogor: Ghalia Indonesia).

Siska Yuni Larasati, “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan DI SMA Ronggolawe Kota Semarang”, (Skripsi), Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009.

SK Mendiknas Nomor 044/U/2002.

Stem.2012.*Penjaminan Mutu Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya).

Sugiyono, 2010. *Manajemen Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: Alfabeta).

Syaiful Sagala, 2013. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta) cet. 4.

UU No. 22 Tahun 1999.

UU tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah. Pada Bab VII Pasal 42 PP 32/2013 Nomor 19 Tahun 2005 juncto Nomor 32 Tahun 2013.

Veitzal Rivai dan Sylviana Murni. *Education Management*. (Jakarta. Grafindo, 2009) Ed. 1 h.168.

Wahjosuidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010) Cet. 1 h. 334.